

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun belakangan, diskusi tentang politik global, keamanan internasional, dan kebijakan luar negeri, telah semakin banyak dikaji melalui perpektif bahasa. Perhatian terhadap peran Bahasa, terutama penggunaan kalimat dalam mengkontruksikan hubungan internasional pun ikut berkembang. Tidak bisa dipungkiri bahasa memiliki pengaruh besar pada kehidupan politik. Diskursus seperti pidato politik dijadikan alat yang ampuh bagi negara dalam konteks hubungan internasional yang terus berubah. Di dalam wacana pidato, tercermin faktor identitas, kepentingan, tujuan dan strategi politik dari pembicara. Melalui pidato politik, pembicara akan membuat sekumpulan argumen untuk atau menentang suatu hal yang mungkin masyarakat lakukan (atau mungkin tidak dilakukan) dan akan menunjukkan bagaimana hal tersebut merupakan hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Secara tidak langsung, pidato merupakan suatu bentuk persuasi untuk mengumpulkan dukungan politik (Jurdana, 2018; Williams et al., 2012).

Sejak terpilih pada 2012, Presiden Cina Xi Jinping telah menyampaikan berbagai pidato pada forum nasional dan internasional. Xi Jinping merupakan seorang pemimpin yang tegas serta berkarisma. Ia dapat menyampaikan makna yang mendalam dan mempengaruhi orang lain melalui ceritanya. Kemampuannya tersebut tercermin melalui pidatonya di depan kongres, pembicaraan selama investigasi, pidato selama kunjungan kenegaraan, dan artikel yang diterbitkan dalam berbagai surat kabar. Dengan memasukkan visi dan konsep besar Cina

seperti “*the great rejuvenation of China*” dan “*Chinese Dream*”, Xi Jinping menekankan aspek humanitas yang kemudian memberikan respon positif dalam kalangan internasional dan bahkan berhasil mengubah *stereotype* Cina di dunia Barat (Cheng & Chen, 2019; Department of Commentary People’s Daily, 2020).

Dibawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina mulai mengadopsi pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih agresif dan asertif dibanding para pendahulunya. Disamping memperkuat kekuatan regional dan globalnya melalui ekspansi ekonomi dan politik, negara ini juga berusaha untuk memikul tanggung jawab pada perdamaian global (Jesus, 2022). Xi Jinping tidak hanya melakukan reformasi menyeluruh sistem politik, militer, atau ekonomi Cina, tetapi Xi secara aktif terlibat dalam membenahan institusi-institusi terkait, dengan cara yang dia yakini akan memperkuat kekuatannya sendiri serta meningkatkan kekokohan dan ketahanan rezim partai-tentara-negara. Dengan cara ini, Ia bisa membuat Cina menjadi negara adikuasa dan membuat dirinya menjadi pemimpin yang hebat. (Bekkevold & Ross, 2016).

Disepanjang kepemimpinan Xi Jinping, Ia dengan gencar mempromosikan ide penolakan proteksionisme dan isolasionisme yang dikumandangkan Trump, mendukung Perjanjian Paris, serta menyatakan bahwa Cina siap memimpin dunia internasional untuk membangun tatanan dunia internasional yang lebih adil dan terbuka (Huang, 2017). Kampanye antikorupsi Xi yang populer telah menakuti para pejabat partai dan militer, hingga akhirnya membuatnya berhasil mengumpulkan kekuatan untuk mendominasi dalam rentang waktu singkat. Dengan otoritas yang melampaui batas ini, Xi telah mengakhiri struktur

kepemimpin konsensual yang berbasis kehati-hatian, meminggirkan birokrasi, dan menempatkan dirinya sebagai pusat pengambilan keputusan pada semua hal yang konsekuensial (Blackwill & Campbell, 2016).

Politik luar negeri Cina selama beberapa tahun terakhir ini lebih tampak pada dimensi ekonomi daripada dimensi politiknya. Pada era Xi Jinping, Cina dengan jelas menyatakan aspirasinya untuk menjadi pemain global akan tetapi Cina memilih pendekatan ekonomi dan meninggalkan opsi militer. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Xi Jinping lebih banyak membicarakan perekonomian dan pembangunan dunia dalam berbagai kesempatan di dalam negeri maupun di luar negeri (Cipto, 2018).

Cina juga berpartisipasi dalam Pembangunan dan investasi membentang dari Asia Timur ke Eropa, yang secara signifikan berhasil memperluas pengaruh ekonomi dan politik Cina (Chatzky & McBride, 2020). Keputusan Cina untuk memberlakukan politik luar negeri yang agresif bertujuan untuk memperoleh posisi yang sama dalam bidang politik seperti perannya dalam ekonomi global. Melalui strategi “*Going Out*” dan “*Belt and Road Initiative*”, yang mendorong investasi Cina di pasar Internasional, menawarkan Cina kesempatan untuk tidak hanya meningkatkan ekonominya sendiri, tetapi juga memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk meningkatkan pengaruhnya di luar negeri (CSIS, 2022).

Menilik sepak terjang Cina yang semakin besar, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana keputusan kebijakan luar negerinya diambil dan dipraktikkan. Penting untuk mengerti mengenai organisasi

dan individu yang berada dibalik kepentingan kebijakan luar negeri dalam sebuah negara yang totaliter seperti Cina. Ada berbagai perbedaan pandangan mengenai siapa yang memimpin Cina dan kebijakan luar negerinya, tetapi dalam sebuah artikel yang diterbitkan *The Diplomat*, Fiddler mengemukakan bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi kunci kebijakan luar negeri Cina yaitu Negara, Partai (dalam hal ini adalah Partai Komunis Cina/CCP), dan masyarakatnya (Fidler, 2021). Franz Schurmann disisi lain mengemukakan bahwa Partai, Negara, dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) adalah struktur utama dibalik organisasi dan ideologi di Cina (Schurmann, 2022).

Diluar berbagai pandangan mengenai siapa pilar utama dalam perumusan arah kebijakan luar negeri Cina, tidak bisa dipungkiri, Presiden Xi Jinping telah menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam mengarahkan kebijakan luar negeri Cina. Ia memegang kendali pada ketiga organisasi vital tersebut. Dimana Ia menjadi Presiden, Sekretaris Jendral Partai Komunis Cina, Sekaligus Ketua Komisi Militer. Arah kebijakan luar Cina dibawah Xi Jinping pun menjadi semakin menarik untuk dibicarakan, terutama jika dianalisis dari segi diskursus pidatonya.

Berangkat dari hal ini, penulis pun tertarik untuk mengkaji bagaimana diskursus kebijakan luar negeri Cina dalam pidato Xi Jinping pada forum nasional dan internasional. Penelitian tentang penggunaan bahasa dalam pidato politik ini penting dan menarik karena bahasa tidak netral dan tergantung pada siapa yang menggunakan atau menyampaikannya (Ayuningtias & Hartanto, 2014). Teks pidato tersebut kemudian akan dikategorisasi menjadi empat tema besar kebijakan luar

negeri Cina yaitu kestabilan politik, ekonomi, militer, dan peran global Cina. Kemudian hasil tersebut akan dianalisis dalam tiga tahapan analisis wacana, mulai dari deskripsi, interpretasi dan eksplanasi dan mengaitkan aspek ideologi Xi, khususnya yang berkaitan dengan relasi kekuasaannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Xi Jinping mendiskusikan kebijakan luar negeri Cina dalam pidato politik di forum nasional dan internasional?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah menjelaskan diskursus kebijakan luar negeri Cina dalam pidato Xi Jinping di forum nasional dan internasional.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat peneliitian merupakan *output* apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Setidaknya, ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, pertama adalah manfaat praktis dan kedua adalah manfaat akademis.

### **a. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah kajian hubungan internasional, khususnya isu yang berkenaan dengan diskurus pidato Xi Jinping di forum nasional dan internasional.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi tentang diskursus pidato Xi Jinping di forum nasional dan internasional yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan oleh aktor-aktor internasional lainnya ketika akan menjalin atau sedang menjalin hubungan bilateral maupun multilateral dengan Cina.

### **1.5 Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan acuan dan rujukan peneliti untuk menggali dan memahami lebih dalam berkaitan dengan isu atau topik yang diangkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa artikel sebelumnya yang berhubungan dengan analisis wacana/narasi politik luar negeri Cina pada Era pemerintahan Xi Jinping.

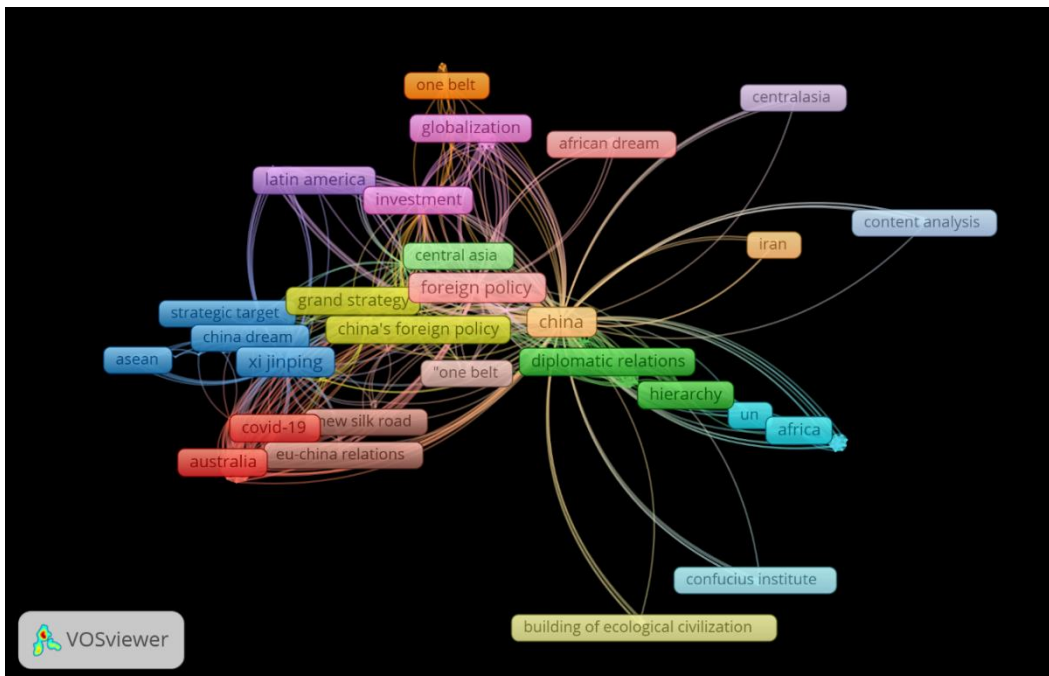
- a. Pertama adalah artikel oleh Zhuang dan Li, berjudul “A Study of Xi Jinping’s Speech Discourse in the Context of Metadiscourse”. Artikelnya membahas mengenai pidato utama Presiden Xi Jinping pada pembukaan upacara Pameran Impor Internasional Cina dan pidato tahun baru xi jinning mulai dari 20122 hingga 2022. Artikel dianalisis menggunakan teori metadiscourse. Penelihan menemukan bahwa ada tiga jenis metadiscourse yang sering digunakan xi jinning, sebut saja Directives, self-mentions, and attitude markers. Ketiga hal ini menjadi daya Tarik afektif yang digunakannya untuk bisa meningkatkan efek persuasi pidato (Zhuang & Li, 2022).
- b. Kedua, dalam tulisannya “Application of Systemic-Functional Grammar in Critical Discourse Analysis-- Taking BBC Reports on the Belt and Road as an Example”, Jiang menggunakan *Critical Discourse Analisis*, yaitu teori umum yang digunakan

untuk menganalisis wacana berita, melaporkan, dan mengungkap ideologi yang tersembunyi di balik bahasa melalui analisis teks. Artikel ini meneliti mengenai beberapa berita BBC dengan topik Belt and Road Initiative dan menggunakan teori tata bahasa Halliday untuk dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sikap dan pandangan media barat diwakili oleh BBC terhadap *Belt and Road*. (Jiang, 2021).

- c. Berbicara mengenai metode *critical discourse analysis* dengan tema besar politik luar negeri Cina, ternyata banyak artikel yang mengkaitkan politik luar negeri Cina dan COVID 19. “A Discourse Analysis of Quotidian Expressions of Nationalism during the COVID-19 Pandemic in Chinese Cyberspace”, artikel yang menganalisis apa dan bagaimana pandangan masyarakat Cina terkait dengan nasionalisme pada masa pandemi. Penulis menemukan bahwa masyarakat Cina cenderung lebih percaya diri dengan kinerja negaranya dibanding negara lain, tetapi mereka juga menunjukkan kewaspadaan bahkan sentiment-sentimen bermusuhan terhadap provokasi eksternal (Zhao, 2021).
- d. Lalu adapula “A Critical Discourse Analysis of Reports about Cina on the COVID-19 Pandemic in The New York Times”, yang berfokus pada analisis wacana kritis pada 35 berita mengenai pandemi yang dikeluarkan oleh The New York Times dari September hingga Desember 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ideologi media dibalik laporan berita sekaligus melihat bentuk image Cina yang dibangun (Mu et al., 2021).

- e. Serta “Chinese Crisis Communication in the Early Stage of the COVID-19 Pandemic: A Discourse Analysis of People's Daily News Articles in Response to Threatening International News Coverage”, yang mengkaji strategi komunikasi internasional Cina selama fase awal pandemi global COVID-19. Menghadapi krisis reputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Partai Komunis Cina (CCP) memobilisasi media berbahasa asingnya dalam upaya untuk mempengaruhi wacana internasional tentang COVID-19 (Ernst et al., 2022).

Selain menggunakan beberapa referensi diatas penulis menggunakan 54 artikel yang diambil dari database Scopus dengan kata kunci “China Foreign Policy” dan “Xi Jinping”. Kemudian data artikel tersebut diolah menggunakan aplikasi Vos Viewer untuk mendapatkan research gap yang dibutuhkan. Dari olahan data tersebut ditemukan 177 item, yang terdiri dari 18 cluster, 992 links, dan total link strength 1054.



**Gambar 1.1. Research Gap menggunakan aplikasi Vos Viewer**



Sumber: diolah oleh penulis

Hasil olahan data menemukan bahwa tidak ada satu artikelpun yang membahas mengenai arah kebijakan politik luar negeri Cina menggunakan analisis wacana kritis. Berangkat dari sinilah, penulis pun tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai arah kebijakan luar negeri Xi Jinping dikhususkan pada sepuluh tahun sejak Xi menjabat. Analisis tersebut akan bersumber dari berbagai pidato berbasis pada konsep critical discourse Analysis.

## **1.6 Kerangka Konseptual**

### **1.6.1 Kebijakan Luar Negeri**

Konsep kebijakan luar negeri merupakan konsep utama dalam ilmu hubungan internasional. Tidak ada definisi pasti mengenai konsep ini, sehingga kadang pengertiannya sukar dipahami. Menurut Hudson, kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah nasional untuk mewujudkan tujuannya dalam interaksi internasional (Hudson, 2016). Dalam definisi tradisional, kebijakan luar negeri merupakan kebijakan suatu negara terhadap aktor eksternal terutama negara lain. Kebijakan tersebut merupakan seperangkat tindakan atau aturan yang mengatur tindakan otoritas politik independen dalam lingkungan internasional (Morin & Paquin, 2018).

Perilaku kebijakan luar negeri tidak dapat dipahami tanpa mengetahui tujuan dan prioritas, kendala internal dan eksternal, serta persepsi tindakan negara. Oleh karenanya, teori perilaku kebijakan luar negeri harus memuat teori negara, meskipun tidak lengkap (Moon, 1983). Dalam arena internasional, kebijakan luar negeri suatu negara dirancang untuk mempertahankan kepentingannya. Setiap negara

memiliki metode, pedoman, dan strategi tersendiri untuk mewujudkan kebijakan luar negerinya. Melalui kebijakan luar negeri inilah, arah politik suatu negara dalam tatanan internasional terbentuk. Artinya, setiap langkah kebijakan luar negeri tentunya akan berpengaruh juga terhadap negara lain. (Ahmed, 2020).

Di sisi lain, inisiatif yang diambil oleh negara hampir selalu diambil untuk memperkuat kekuasaan, kontrol sosial dan kelangsungan hidup negara, terutama ketika berkaitan dengan isu kebijakan luar negeri. Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengambil keputusan yang mengikat dan memaksa warga negaranya untuk patuh, dengan tujuan menjaga kedaulatan negaranya masing-masing (Han, 2018).

Studi dan analisis kebijakan luar negeri memungkinkan dilakukannya evaluasi keputusan dan tindakan suatu negara. Dengan melakukan analisis terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, khalayak dapat memprediksi tindakan negara dalam situasi tertentu, sehingga dapat menempatkan langkah-langkah dan mekanisme yang diperlukan untuk mengimbangi kemungkinan dampak negatif dari kebijakan tersebut (Avutor, 2001). Akan tetapi perlu diingat bahwa negara bukan suatu struktur tunggal. Bahkan negara yang authoritarian memiliki organisme politik yang kompleks. Oleh karenanya, semua kebijakan luar negeri dibentuk berdasarkan konteks domestic. Hal ini mencakup budaya politik dalam masyarakat.

Dalam menganalisis politik luar negeri, terdapat tiga level analisis, mulai dari level internasional, level nasional, dan individual atau kelompok kecil. Para analis berusaha untuk menjelaskan kebijakan luar negeri dalam level internasional mengemukakan bahwa sistem

internasional merupakan latar belakang terbesar dalam pengambilan keputusan. Analisis pada level ini meliputi dinamika seperti sifat dan aturan sistem internasional, distribusi kekuasaan antar negara dan aktor lain seperti organisasi internasional atau transnasional. Akan tetapi fokus pada level internasional dapat menyebabkan berbagai output yang berbeda. Karena tidak mungkin untuk mengharapkan setiap negara berperilaku di cara yang sama dan menyamakan keputusan dalam mereka kebijakan luar negeri, sehingga analisis tingkat negara menjadi tak terelakkan (Hudson, 2006).

Analisis tingkat negara lebih sering digunakan karena lebih komprehensif dan rinci karena menggambarkan perbedaan yang signifikan di antara para aktor dalam sistem internasional. Analisis tingkat negara mencakup dinamika seperti geopolitik, sumber daya, masalah ekonomi dan populasi serta sistem politik dan institusi. Analisis tingkat negara mengemukakan bahwa negara bebas untuk menentukan kebijakan aoa yang akan diikuti. Singkatnya pada tingkatan ini, level analisis berfokus pada apa yang akan dilakukan negara dan bagaimana mereka memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. Eksekutif politik biasanya merupakan aktor subnasional terkuat dalam proses politik luar negeri. Para eksekutif politik tersebut memiliki kekuatan terhadap militer suatu negara. Mereka juga memiliki reputasi yang baik sehingga bisa digunakan untuk mendapatkan dukungan politik terhadap kebijakan yang mereka keluarkan (Rourke, 1997).

Analisis ditingkat individual di sisi lain, mengemukakan bahwa jenis analisis yang mengabaikan individu tidak akan lengkap tanpa menyisakan ruang untuk perubahan, kreativitas, persuasi, atau

akuntabilitas. Analisis pada level ini biasanya mencakup factor psikologis dan kognitif, proses memperoleh pengetahuan, pengalaman, nilai, sistem kepercayaan individu atau kelompok pembuat kebijakan luar negeri (Özer, 2018).

Pengambil keputusan atau pemimpin suatu negara adalah bagian terpenting dari proses pengambilan keputusan. Pemimpin adalah orang yang membuat keputusan akhir. Namun biasanya, kepribadian pemimpin tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara langsung. Pengaruh langsung seperti itu dapat dilihat apabila berada dalam situasi dimana perubahan sosial dan politik yang besar sedang berlangsung, atau ketika pengambilan keputusan berada sepenuhnya berada di tangan pemimpin. Bagaimana sebuah kelompok atau individu mempresepsikan sebuah situasi, individu lainnya, atau negara lain merupakan sebuah distorsi realitas. Persepsi yang terdistorsi menjadi penting untuk dikaji karena seorang pemimpin cenderung bersikap sesuai dengan apa yang mereka anggap benar dibanding apa yang sebenarnya benar secara objektif (Rourke, 1997; Verba, 1961).

Tujuan kebijakan luar negeri dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah nilai dari kepentingan utama yang melibatkan setiap eksistensi pemerintah dan bangsa yang harus dilindungi dan diperluas sepanjang waktu. Pencapaian nilai atau kepentingan ini terkadang bisa bersifat memaksa. Hal ini biasanya berkaitan dengan pertahanan kawasan dan identitas. Selanjutnya adalah tujuan jangka menengah yang biasanya memaksakan tuntutan pada negara lain. Ini terkait dengan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan citra negaranya dalam tatanan internasional, serta imperialism. Sedangkan tujuan jangka

panjang adalah rencana, impian, atau pandangan, atau bahkan ideologi negaranya berpengaruh dalam tatanan internasional (Holsti, 1988).

### **1.6.2 Analisis Wacana Kritis**

Analisis Wacana Kritis atau juga yang dikenal dengan Critical Discourse Analysis (CDA) merupakan bentuk analisis yang membantu memahami Bahasa dalam penggunaannya. Bahasa ternyata bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi, namun juga digunakan sebagai instrument untuk melakukan sesuatu atau sarana menerapkan strategi kekuasaan. Pendekatan pada analisis wacana mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis, sehingga akses terhadap realitas selalu dibangun melalui Bahasa. Dengan menggunakan Bahasa, penulis dapat memberikan kontribusi pada pengkonstruksian realitas (Haryatmoko, 2016).

Objek yang dikategorikan sebagai wacana terdiri dari sejumlah bahasa dan bentuk ekspresi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Didalamnya termasuk penggunaan bahasa untuk saling menukarkan informasi, seperti komentar, analisis, hiburan, anatu berbagai bentuk kritikan dan konteks sosial lainnya. Sebagai contoh litaratur dan ekspresi artistic, jurnal dan penelitian ilmiah, pidato dan sebagainya. Setiap bentuk wacana memiliki kerangka sosial dan fungsinya masing-masing. Analisis wacana dalam hal ini tidak hanya memberikan analisis terhadap struktur bahasa dan kegunaannya. Melainkan juga mengaca pada evaluasi konseptual antara bahasa, norma sosial, tindakan politik, dan bahkan ideologi (Thiesmeyer, 2003).

Dalam analisis wacana kritis, bahasa merupakan sebuah diskursus yang menunjukkan bentuk sosial yang membentuk dan merubah dunia.

Hal ini juga berkaitan dengan bentuk tindakan sosial yang secara historis kultural muncul dalam hubungan yang dialektis dengan praktik-praktik sosial lainnya. Melalui analisis wacana kritis, beragamnya wacana dalam suatu pernyataan, cerita atau laporan bisa ditemukan kepentingan, nilai atau ideologi yang ada dibalikinya. Kunci analisis pendekatan ini terdapat pada konsistensi praktik social produsen wacana yang didukung oleh data-data linguistik yang bisa ditemukan dalam wacana yang sedang diteliti (Jorgensen & Phillips, 2017).

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis versi Norman Fairclough, dimana melihat adanya pertentangan antara kenyataan sosial dan wacana. Diskursus menurut Fairclough memiliki tiga fungsi, mulai dari fungsi identitas, fungsi relasional, dan fungsi ideasional. Fungsi identitas menekankan peranan wacana dalam membangun identitas sosial anggota masyarakat. Fungsi relasional berkenaan dengan kehadiran wacana yang bertujuan untuk membentuk hubungan sosial yang disesuaikan dengan identitas sosial dalam masyarakat. Fungsi ideasional merujuk pada peran wacana dalam membentuk pemahaman dan keyakinan yang menjadi basis bagi masyarakat untuk memahami dunia, identitas sosial, serta hubungan sosial (Fairclough, 2015).

Aspek utama pertama yang harus diperhatikan adalah teks harus diuji melalui pendekatan linguistik yang mencakup elemen formal seperti kosakata, tata bahasa, dan struktur teks. Setiap elemen formal tersebut harus diteliti secara mendalam dengan mengekstrak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Aspek utama pertama yang harus diperhatikan adalah teks harus diuji melalui pendekatan linguistik yang mencakup elemen formal seperti kosakata, tata bahasa, dan struktur teks. Setiap

elemen formal tersebut harus diteliti secara mendalam dengan mengekstrak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Analisis wacana kritis Fairclough menitikberatkan pada tiga hal. Pertama, setiap teks memiliki fungsi khusus. kedua, praktik wacana meliputi cara para penutur sebagai produser teks memproduksi teks mereka. Ketiga, ada praktik sosial budaya yang dapat dianalisis melalui ekonomi, politik dan budaya. (Kristina et al., 2020).

Fairclough menawarkan tiga jenis analisis yang berbeda berkaitan dengan dimensi analisisnya, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya. Dalam aspek teks, deskripsi digunakan untuk menganalisis konten teks dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana teks tersebut disajikan. Pada tahapan ini, proses produksi teks diperiksa hubungannya dengan konteks sosial-budaya yang mempengaruhi pembuatan teks tersebut. Selanjutnya pada praktik wacana, dapat digunakan interpretasi yang bertujuan untuk mengkaji proses, yaitu menafsirkan teks secara mendalam dan memahami bagaimana teks tersebut dikonsumsi dan diinterpretasikan oleh pembaca. Terakhir, tahapan eksplanasi yang berfokus pada menjelaskan bagaimana diskursus terkait dengan praktik sosial dan bagaimana diskursus memengaruhi struktur sosial serta efek reproduktifnya pada struktur tersebut, baik itu efek yang memperkuat atau mengubah struktur. Dalam analisis ini, relasi kekuasaan menjadi fokus dari struktur sosial. Sementara itu, proses dan praktik sosial yang menjadi fokus adalah proses dan praktik perjuangan sosial. Oleh karena itu, tahap eksplanasi dimaksudkan untuk melihat diskursus sebagai bagian dari pertarungan sosial dalam konteks relasi kekuasaan (Fairclough, 2015).

Fairclough memperinci empat nilai yang terdapat dalam elemen formal tersebut. Pertama, nilai eksperiential yang mengacu pada ideologi yang diadopsi oleh produsen teks dalam merepresentasikan fenomena alam atau sosial. Aspek nilai eksperiential ini dibutuhkan dalam memahami bagaimana perbedaan ideologi tercermin dalam teks tertulis. Dalam upaya memahami realitas, dapat dilakukan analisis terhadap penggunaan kosakata yang berlebihan yang menunjukkan preferensi produsen teks terhadap aspek tertentu dari realitas. Selain itu, skema klasifikasi yang digunakan untuk membagi realitas juga dapat menunjukkan representasi ideologis tertentu yang digunakan untuk memahami realitas tersebut. Dari analisis tersebut, dapat diperoleh nilai eksperiential yang berguna (Fairclough, 2015).

Konsep penting lainnya dari Fairclough adalah intertekstualitas yang menjelaskan hubungan antara berbagai wacana dalam suatu teks. Hal ini menunjukkan bahwa produksi teks dipengaruhi oleh wacana yang telah ada sebelumnya dan dapat mempengaruhi sebuah situasi secara menyeluruh. Konsep ini juga memiliki efek ideologis yang dapat mempengaruhi struktur dan restrukturasi diskursus yang ada. Ketika kekuasaan dan ideology dikaitkan dengan diskursus, intertekstualitas dapat bertindak sebagai mekanisme untuk mempertahankan atau mengubah relasi dominasi. Paham ideologi tertanam dalam percakapan dan tindakan yang seringkali berlangsung secara halus dan tidak disadari sehingga individu menganggapnya sebagai sesuatu yang alami dan benar. Melalui mekanisme alamiah, ideologi membatasi praktik kognitif dan sosial dari individu dan masyarakat. Namun, individu masih memiliki kemampuan reflektif kritis untuk mengevaluasi praktik percakapan dan ideologi tersebut. Ini sejalan dengan konsep hegemoni yang



menunjukkan adanya persaingan ideologis antar kelompok untuk mencapai penerimaan publik dan kekuasaan hegemonis (Munfarida, 2014).

Dalam berbagai pidato yang dibawakan oleh Xi Jinping, ia kerap kali menunjukkan kovenensi sosial dan kewacanaan yang diyakininya. Ungkapan yang dikemukakan oleh Xi dalam berbagai forum internasional menunjukkan ideology dan relasi sosial yang dianutnya walaupun seringkali ditampilkan secara tersirat. Karenanya menggunakan analisis wacana kritis, penulis ingin mengetahui bagaimana upaya Xi Jinping untuk memperjuangkan kepentingan nasional Cina, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakannya. Target *audience* dari pidato yang Xi bergantung pada dimana pidato tersebut dibawakan. Pada berbagai forum nasional, Xi Jinping kerap menargetkan warna negaranya sebagai tujuan utama. Sedangkan masyarakat global sebagai target dalam forum internasional.

## **1.7 Metodologi**

Penelitian ini akan menggunakan metode campuran (*mix method*) yang merupakan bentuk pendekatan yang memiliki asumsi filosofis sendiri dan metode penyelidikan. Sebagai sebuah metodologi, asumsi filosofis merupakan salah satu sumber untuk mengarahkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber dalam satu penelitian. Mencampur dua metode bisa saja lebih baik daripada hanya menggunakan satu metode saja. Hal ini karena memungkinkan mendapatkan hasil yang beragam terhadap suatu feenomena penelitian yang tidak dapat sepenuhnya dipahami dengan hanya menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Yin dalam (Hafsa, 2019) mengemukakan bahwa penelitian

yang menggunakan metode campuran dapat menghasilkan data yang berkualitas karena terdiri dari berbagai tahapan penelitian, mulai dari membentuk pertanyaan penelitian, pengambilan sampel, pengumpulan data, analisis dan akhirnya interpretasi. Desain metode campuran bisa mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai sumber data yang dapat membantu mempelajari permasalahan yang kompleks (Dawadi et al., 2021; Poth & Munce, 2020).

Untuk mendukung metode penelitian campuran penulis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk mempermudah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yang menjadi data utama adalah 16 pidato Xi Jinping pada forum nasional dan internasional dalam 10 tahun pemerintahannya. Data yang telah dikumpulkan dari sampel pidato tersebut kemudian dibagi menjadi empat kutipan yaitu ekonomi, stabilitas politik, militer, dan peran global Cina. Kutipan tersebut dibentuk berdasarkan kata kunci tertentu dibawah berbagai tema Politik luar negeri Xi Jinping sebagai tema analisa yang lebih luas. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai arah kebijakan luar negeri Cina di era Xi Jinping, penulis menggunakan aplikasi NVIVO 12 Plus ini sebagai penjamin validitas data untuk analisis yang lebih mendalam. Adapun fitur yang akan digunakan untuk menganalisa adalah *Tree-map*, *Word-cloud* dan *crosstab analysis*.

Berbagai pidato yang dibawakan oleh Xi Jinping kemudian akan dianalisis melalui analisis wacana kritis, yaitu pendekatan analisis yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan yang tersembunyi dan muncul dalam wacana (Johnson & McLean, 2020). Melalui analisis wacana ini, penulis ingin melihat berbagai instrumen kebijakan luar negerinya yang paling sering digunakan oleh Xi Jinping dalam berbagai pidatonya, serta maksud penggunaan instrumen tersebut baik di forum nasional maupun internasional. Selanjutnya, instrumen kebijakan tersebut kemudian akan diinterpretasi dan dianalisis dengan mengaitkan aspek ideologi Xi, khususnya yang berkaitan dengan relasi kekuasaannya.

### **1.8 Hipotesa**

Penelitian ini menarik sebuah hipotesa bahwa diskursus politik luar negeri dalam forum nasional mengartikulasikan pentingnya kohesivitas nasional. Sedangkan diskursus politik luar negeri Cina dalam forum internasional mengartikulasikan kepentingan interdependensi Cina.

### **1.9 Sistematika**

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam Tesis ini akan dibagi dan dijelaskan ke dalam lima bab, yaitu:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan sejumlah sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, hipotesis, jagkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TATA KELOLA POLITIK CINA**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara umum tata kelola politik Cina baik secara domestic ataupun internasional. Penulis menemukan bahwa Pemeliharaan stabilitas Cina telah menjadi kebijakan inti dari pemerintahan komunis dibawah Xi Jinping. Melalui Partai Komunis Cina (PKT), Xi berusaha mengkombinasikan unsur *hard* dan *soft diplomacy* dalam politik di dalam dan luar negerinya.

## **BAB III DISKURSUS PIDATO XI JINPING**

Bab ini akan membahas mengenai data pidato yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Ada enam belas pidato yang dijadikan sampel penelitian, yang selanjutnya pidato tersebut akan dibagi menjadi pidato dalam forum nasional dan internasional, dengan masing-masing berjumlah delapan pidato. Pidato tersebut akan dijelaskan secara rinci mengenai waktu, tujuan, bahkan kontroversi yang terkait pada pidato tersebut.

## **BAB IV ANALISA KEBIJAKAN LUAR NEGERI DALAM DISKURSUS PIDATO XI JINPING DALAM FORUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

Pada bab ini, penulis akan menganalisis isi pidato Xi Jinping dalam dengan menggunakan konsep analisis wacana kritis dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah kompleksitas perubahan

global, Xi Jinping memperhatikan kepentingan domestic dan internasional, dengan berfokus pada pembangunan dan keamanan sebagai prioritas utama yang kemudian diturunkan menjadi empat tema antara lain; kestabilan keadaan domestik (political priorities), pertumbuhan ekonomi (economy priorities), keamanan nasional (military priorities), dan kerjasama regional (China's global role). Keempat tema tersebut diolah menggunakan aplikasi NVIVO 12 Plus. Hasil olahan data akan dianalisis lebih lanjut melalui konsep analisis wacana kritis dan kebijakan luar negeri.

## **BAB V**

## **KESIMPULAN**